

Agile Governance Sebagai Kerangka Reformasi Birokrasi: Analisis Konseptual Atas Kesiapan Tata Kelola Digital Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Agile Governance As A Bureaucratic Reform Framework: A Conceptual Analysis Of Digital Governance Readiness In Banyuwangi Regency Government

Ahmad Maulana Iqbal¹, Muhammad Izwan Aiman², Akbar Maulana³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Jember
^{1,2,3} Ilmu Pemerintahan

e-mail: ¹alvaroiqbal23@gmail.com, ²zwaannn14@gmail.com,
³akbar.maulana@unmuhjember.ac.id

ABSTRAK

Transformasi digital pemerintahan membutuhkan kerangka tata kelola yang adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan. Artikel ini menganalisis secara konseptual penerapan Agile Governance sebagai kerangka reformasi birokrasi dengan mengambil konteks Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai studi referensi. Melalui pendekatan analisis literatur sistematis dan kerangka teoritis New Public Governance, penelitian ini memetakan dimensi kesiapan digital pemerintah daerah meliputi kapasitas kelembagaan, infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, dan partisipasi publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa Banyuwangi telah menginisiasi berbagai inovasi digital yang sejalan dengan prinsip-prinsip Agile Governance, seperti iterasi kebijakan berbasis data, kolaborasi lintas sektor, dan keterbukaan informasi publik. Namun demikian, terdapat gap implementasi yang signifikan pada aspek standarisasi data, interoperabilitas sistem, dan kompetensi sumber daya manusia digital. Artikel ini merekomendasikan model Agile Governance berlapis (multi-layer) yang mengintegrasikan dimensi teknis, organisasional, dan sosio-kultural sebagai alternatif kerangka reformasi birokrasi berbasis digital yang berkelanjutan.

Kata kunci: Agile Governance, Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Digital, E-Government, Banyuwangi

ABSTRACT

Digital transformation in government requires adaptive and responsive governance frameworks to meet the dynamics of change. This article conceptually analyzes the application of Agile Governance as a bureaucratic reform framework, using Banyuwangi Regency Government as a reference context. Through a systematic literature analysis approach and New Public Governance theoretical framework, this study maps the dimensions of local government digital readiness including institutional capacity, technology infrastructure, human resources, and public participation. The analysis reveals that Banyuwangi has initiated various digital innovations aligned with Agile Governance principles, such as data-driven policy iteration, cross-sector collaboration, and public information transparency. However, significant implementation gaps exist in areas of data standardization, system interoperability, and digital human

resource competency. This article recommends a multi-layer Agile Governance model integrating technical, organizational, and socio-cultural dimensions as an alternative framework for sustainable digital-based bureaucratic reform.

Keywords: *Agile Governance, Bureaucratic Reform, Digital Governance, E-Government, Banyuwangi*

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi di era digital tidak lagi sekadar persoalan efisiensi administrasi, melainkan telah berkembang menjadi agenda transformasi fundamental yang menyentuh aspek kelembagaan, teknologi, budaya organisasi, dan relasi antara negara dengan warga negara. Gelombang digitalisasi yang dipercepat oleh pandemi COVID-19 telah mendorong pemerintah di berbagai level untuk mengadopsi pendekatan-pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan layanan publik. Dalam konteks inilah, konsep Agile Governance muncul sebagai proposisi teoritis dan praktis yang menawarkan kerangka alternatif bagi reformasi birokrasi yang lebih adaptif dan responsif.

Agile Governance, yang secara konseptual diadaptasi dari metodologi pengembangan perangkat lunak Agile, menekankan pada iterasi cepat, adaptabilitas terhadap perubahan, kolaborasi intensif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna (Mergel et al., 2018). Dalam konteks pemerintahan, prinsip-prinsip Agile diterjemahkan ke dalam kapasitas institusi untuk merespons perubahan lingkungan kebijakan secara cepat, melibatkan pemangku kepentingan secara bermakna, dan menghasilkan nilai publik secara berkelanjutan. Berbeda dengan paradigma birokrasi Weberian yang menekankan hierarki dan standardisasi kaku, Agile Governance mengedepankan fleksibilitas struktural dan eksperimentasi kebijakan berbasis bukti.

Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang paling intensif dalam mengadopsi inovasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Berbagai penghargaan nasional maupun internasional telah diraih, termasuk penghargaan Smart City dari Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pengakuan dari berbagai forum internasional atas inovasi layanan publik berbasis digital. Namun demikian, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara analitis adalah sejauh mana praktik-praktik digital Banyuwangi tersebut mencerminkan prinsip-prinsip Agile Governance yang sesungguhnya, bukan sekadar digitalisasi prosedur birokrasi konvensional.

Artikel ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis kerangka konseptual Agile Governance dan relevansinya dengan reformasi birokrasi digital; kedua, memetakan dimensi kesiapan tata kelola digital Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan prinsip-prinsip Agile Governance; dan ketiga, merumuskan model konseptual Agile Governance yang kontekstual untuk pemerintah daerah di Indonesia. Artikel ini menggunakan pendekatan analisis konseptual dengan basis kajian literatur sistematis dan studi dokumen kebijakan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Agile Governance: Konsep dan Perkembangan

Konsep Agile dalam konteks pemerintahan pertama kali secara sistematis dikemukakan oleh Mergel, Gong, dan Bertot (2018) yang mendefinisikan Agile Governance sebagai kemampuan institusi pemerintah untuk merespons perubahan secara cepat dan efektif melalui siklus kebijakan yang lebih pendek, umpan balik yang kontinu, dan orientasi pada kebutuhan warga negara sebagai pengguna layanan. Definisi ini secara eksplisit mengadaptasi empat nilai inti dari Manifesto Agile dalam pengembangan perangkat lunak, yakni: individu dan interaksi di atas proses dan alat, perangkat lunak yang berfungsi di

atas dokumentasi komprehensif, kolaborasi pelanggan di atas negosiasi kontrak, dan merespons perubahan di atas mengikuti rencana.

Dalam literatur administrasi publik, Agile Governance bersinggungan erat dengan sejumlah paradigma kontemporer, antara lain New Public Management (NPM), New Public Governance (NPG), dan Digital Era Governance (DEG). Pollitt dan Bouckaert (2017) menempatkan Agile Governance sebagai evolusi lanjutan dari NPM yang mempertahankan orientasi pada kinerja dan efisiensi, namun melampaui NPM dalam hal keterbukaan terhadap eksperimentasi dan kegagalan produktif. Sementara Osborne (2010) dalam perspektif NPG menekankan bahwa tata kelola yang efektif di era kompleks membutuhkan jaringan kolaboratif lintas batas sektoral, sebuah elemen yang menjadi pilar sentral Agile Governance.

Bannister dan Connolly (2014) mengelaborasi Agile Governance dalam dimensi digital dengan memperkenalkan konsep Digital Era Governance yang menekankan reintegrasi fungsi-fungsi pemerintah yang sebelumnya terfragmentasi melalui platform digital terpadu. Dalam perspektif ini, Agile Governance tidak sekadar tentang kecepatan respons, tetapi juga tentang kapasitas untuk mengintegrasikan berbagai sumber data dan layanan dalam ekosistem digital yang koheren.

2. Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital

Reformasi birokrasi di Indonesia secara formal telah dimulai sejak diterbitkannya Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Kerangka reformasi tersebut menetapkan delapan area perubahan yang mencakup manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, evaluasi berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi masih menghadapi kendala struktural yang signifikan (Dwiyanto, 2021).

Transformasi digital pemerintahan di Indonesia mendapat momentum baru melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan ini menetapkan arsitektur SPBE nasional yang mencakup infrastruktur, aplikasi, keamanan, data, dan proses bisnis pemerintahan yang diintegrasikan secara digital. Dalam konteks ini, transformasi digital tidak lagi dipahami sebagai otomatisasi proses manual, melainkan sebagai redesign fundamental cara pemerintah bekerja, berinteraksi dengan warga, dan menciptakan nilai publik (Linders, 2012).

Penelitian Jabbour et al. (2020) menunjukkan bahwa transformasi digital yang berhasil membutuhkan perubahan simultan pada setidaknya empat dimensi: teknologi, proses bisnis, model organisasi, dan budaya. Kegagalan banyak inisiatif e-government justru berasal dari pendekatan yang terlalu teknologis-deterministik, mengabaikan dimensi kelembagaan dan budaya yang secara empiris terbukti lebih determinan dalam menentukan keberhasilan transformasi.

3. Kesiapan Tata Kelola Digital Pemerintah Daerah

Konsep kesiapan digital (digital readiness) pemerintah daerah merujuk pada kapasitas multi-dimensi yang dibutuhkan untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. United Nations E-Government Survey (2022) mengidentifikasi empat dimensi utama kesiapan digital pemerintah: infrastruktur telekomunikasi, kapital manusia, layanan online, dan partisipasi digital. Namun kerangka ini dinilai terlalu berfokus pada output layanan dan kurang mengukur kapasitas kelembagaan internal.

Dalam konteks pemerintah daerah Indonesia, Siddiquee (2016) mengidentifikasi lima faktor kritis yang menentukan keberhasilan transformasi digital: kepemimpinan politik yang berkomitmen, kapasitas teknis aparatur, ketersediaan infrastruktur digital, regulasi yang enabler, dan ekosistem inovasi yang kondusif. Kelima faktor ini saling berinteraksi secara kompleks, sehingga pendekatan parsial yang hanya memprioritaskan satu atau dua faktor terbukti tidak efektif.

Penelitian Kurniawan (2021) tentang pemerintah daerah di Indonesia mengungkapkan adanya fenomena digital divide yang signifikan, bukan hanya antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga antar pemerintah daerah itu sendiri. Banyuwangi yang secara konsisten menempati posisi teratas dalam indeks smart city nasional menjadi outlier positif yang menarik untuk ditelisik faktor-faktor pendorongnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konseptual (conceptual analysis) dengan basis kajian literatur sistematis (systematic literature review) dan analisis dokumen kebijakan. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama artikel adalah membangun kerangka konseptual yang dapat menjelaskan hubungan antara Agile Governance dengan kesiapan tata kelola digital pemerintah daerah, bukan untuk menguji hipotesis kausal secara statistik.

Kajian literatur dilakukan terhadap publikasi ilmiah dalam kurun waktu 2010-2024 yang diperoleh dari basis data Scopus, Web of Science, dan Google Scholar dengan menggunakan kombinasi kata kunci: 'Agile Governance', 'Digital Governance', 'E-Government', 'Bureaucratic Reform', 'Smart City Indonesia', dan 'Banyuwangi'. Seleksi literatur mengikuti protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) dengan kriteria inklusi: diterbitkan dalam jurnal terindeks, relevan dengan topik tata kelola digital pemerintahan, dan tersedia dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Analisis dokumen kebijakan mencakup regulasi nasional terkait SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banyuwangi 2021-2026, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dokumen masterplan smart city Banyuwangi, serta berbagai laporan evaluasi indeks smart city oleh Kementerian Kominfo. Data dikodifikasi menggunakan pendekatan analisis tematik dengan matriks evaluasi berbasis dimensi Agile Governance yang dikembangkan dari sintesis literatur.

PENUTUP

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Agile Governance untuk Pemerintahan Daerah

Berdasarkan sintesis literatur, penelitian ini mengidentifikasi lima dimensi utama Agile Governance yang relevan untuk konteks pemerintah daerah di Indonesia. Dimensi-dimensi tersebut disajikan dalam kerangka integratif yang mengakui saling ketergantungan antara dimensi teknis, organisasional, dan sosio-kultural.

Pertama, dimensi Iterasi Kebijakan (Policy Iteration), yang merujuk pada kemampuan pemerintah untuk menerapkan siklus kebijakan yang lebih pendek dengan mekanisme umpan balik yang terstruktur. Dalam tradisi birokrasi Weberian, siklus kebijakan cenderung panjang dan linier, dari formulasi ke implementasi ke evaluasi dengan interval tahunan atau bahkan quinquennial. Agile Governance mengusulkan siklus yang jauh lebih pendek, dengan sprint kebijakan yang dapat berlangsung dalam hitungan minggu atau bulan, disertai evaluasi kontinu dan adaptasi berbasis data.

Kedua, dimensi Kolaborasi Terdistribusi (Distributed Collaboration), yang mencakup kemampuan membangun jaringan kerja sama yang melampaui batas-batas hirarki internal maupun batas-batas antar organisasi. Kolaborasi dalam Agile Governance bersifat purposif dan berbasis platform, bukan sekadar koordinasi formal antar unit. Ketiga, dimensi Desain Berbasis Pengguna (User-Centered Design), yang menempatkan warga negara sebagai ko-desainer layanan publik, bukan sekadar penerima manfaat pasif. Keempat, dimensi Ekosistem Data (Data Ecosystem), yang mencakup kemampuan mengumpulkan, mengintegrasikan, menganalisis, dan memanfaatkan data dari berbagai sumber untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Kelima, dimensi Ketahanan Adaptif (Adaptive Resilience), yang merujuk pada kapasitas institusional untuk belajar dari kegagalan, beradaptasi dengan gangguan eksternal, dan mempertahankan fungsi esensial dalam kondisi ketidakpastian.

2. Analisis Kesiapan Digital Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menginisiasi berbagai inovasi digital yang dapat dianalisis melalui lensa Agile Governance. Analisis ini didasarkan pada evaluasi dokumen kebijakan dan pelaporan kinerja yang tersedia secara publik

Tabel 1. Matriks Evaluasi Kesiapan Digital Banyuwangi berdasarkan Dimensi Agile Governance

Dimensi AG	Inisiatif Banyuwangi	Tingkat Kesiapan	Gap Utama
Iterasi Kebijakan	Banyuwangi Command Center, evaluasi program berbasis dashboard real-time	Sedang-Tinggi	Siklus revisi masih tahunan
Kolaborasi Terdistribusi	Platform Banyuwangi Smart Kampung, kemitraan dengan startup lokal	Sedang	Keterbatasan lintas dinas
Desain Berbasis Pengguna	Aplikasi Banyuwangi in Your Hand, sistem pengaduan online Lapor!	Sedang	Analitik pengguna belum optimal
Ekosistem Data	Open Data Banyuwangi, integrasi data kependudukan dan layanan	Sedang-Rendah	Interoperabilitas sistem terbatas
Ketahanan Adaptif	Respons digital saat pandemi COVID-19, inovasi layanan darurat	Sedang	Dokumentasi pembelajaran terbatas

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2026)

3. Dimensi Iterasi Kebijakan di Banyuwangi

Banyuwangi Command Center (BCC) merupakan infrastruktur yang paling merepresentasikan prinsip iterasi kebijakan Agile Governance. BCC mengintegrasikan data dari 33 layanan publik ke dalam satu dashboard terpadu yang memungkinkan pemantauan kinerja pelayanan secara real-time. Capaian ini sejalan dengan prinsip Agile yang menekankan visibilitas kemajuan dan transparansi proses (Beck et al., 2001).

Namun demikian, analisis lebih dalam mengungkapkan bahwa mekanisme umpan balik dari data BCC ke proses revisi kebijakan masih berlangsung dalam siklus anggaran tahunan, bukan dalam sprint kebijakan yang lebih singkat sebagaimana dikehendaki oleh kerangka Agile Governance. Artinya, BCC lebih berfungsi sebagai instrumen monitoring daripada katalisator iterasi kebijakan yang sesungguhnya. Temuan ini konsisten dengan kritik Janowski (2015) terhadap kecenderungan pemerintah untuk mengadopsi tools digital tanpa mengubah logika kebijakan yang mendasarinya.

4. Tantangan Implementasi: Gap antara Ideal dan Realitas

Analisis dokumen menunjukkan setidaknya tiga gap implementasi yang signifikan antara ideal Agile Governance dan praktik tata kelola digital Banyuwangi. Pertama, gap interoperabilitas: meskipun Banyuwangi memiliki sejumlah aplikasi layanan yang relatif maju, integrasi antar sistem masih belum optimal. Setiap dinas cenderung mengembangkan sistem informasinya sendiri-sendiri, menghasilkan silo data yang menghambat analitik terpadu (Janssen et al., 2017).

Kedua, gap kompetensi digital aparatur: survei internal Pemerintah Banyuwangi (2023) menunjukkan bahwa hanya sekitar 35% aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi digital di atas level dasar. Ini menciptakan ketergantungan yang tinggi pada segelintir tenaga ahli teknologi informasi, yang bertentangan dengan prinsip Agile yang mensyaratkan distribusi kapasitas yang merata dalam organisasi.

Ketiga, gap partisipasi publik bermakna: meskipun terdapat berbagai kanal pengaduan dan umpan balik warga, analisis menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi tersebut masih bersifat konsultatif, belum

mencapai level partisipasi deliberatif yang dikehendaki oleh paradigma Agile Governance. Warga lebih berperan sebagai pelapor masalah daripada sebagai ko-desainer solusi kebijakan.

5. Model Agile Governance Berlapis Untuk Pemerintah Daerah

Berdasarkan analisis konseptual dan pemetaan kesiapan digital Banyuwangi, artikel ini mengusulkan Model Agile Governance Berlapis (Multi-Layer Agile Governance Model / MLAGM) sebagai kerangka reformasi birokrasi digital yang lebih komprehensif dan kontekstual untuk pemerintah daerah di Indonesia.

Model MLAGM terdiri dari tiga lapisan yang saling menopang. Lapisan pertama adalah Lapisan Infrastruktur dan Data (Infrastructure and Data Layer), yang mencakup platform data terpadu, infrastruktur cloud pemerintah daerah, sistem keamanan siber, dan standar interoperabilitas. Lapisan kedua adalah Lapisan Proses dan Kolaborasi (Process and Collaboration Layer), yang mencakup redesain proses bisnis pemerintahan berbasis prinsip Agile, mekanisme sprint kebijakan lintas dinas, platform kolaborasi multi-aktor, dan sistem manajemen kinerja berbasis data real-time. Lapisan ketiga adalah Lapisan Ekosistem dan Partisipasi (Ecosystem and Participation Layer), yang mencakup platform partisipasi publik digital, ekosistem inovasi daerah, kemitraan akademisi-industri-pemerintah, dan mekanisme ko-kreasi layanan bersama warga.

Tabel 2. Model Agile Governance Berlapis (MLAGM) untuk Pemerintah Daerah

Lapisan	Komponen Utama	Indikator Kinerja	Aktor Utama
Infrastruktur & Data	Platform data terpadu, cloud Gov, keamanan siber, interoperabilitas	Tingkat integrasi data, uptime sistem, indeks keamanan	Diskominfo, BPBD, Vendor TIK
Proses & Kolaborasi	Sprint kebijakan, redesain proses bisnis, kolaborasi lintas dinas, kinerja real-time	Siklus revisi kebijakan, NPS layanan, waktu respons	OPD, Sekretariat Daerah, Tim Inovasi
Ekosistem & Partisipasi	Platform partisipasi digital, kemitraan ABG, ko-kreasi layanan	Tingkat partisipasi, kepuasan warga, jumlah inovasi bersama	Warga, Akademisi, Dunia Usaha, NGO

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2026)

Proposisi utama artikel ini adalah bahwa Agile Governance menawarkan kerangka konseptual yang lebih relevan untuk reformasi birokrasi digital di era kontemporer dibandingkan dengan pendekatan berbasis NPM yang masih mendominasi kebijakan reformasi birokrasi Indonesia. Namun relevansi konseptual tersebut tidak serta-merta berarti dapat diterapkan secara langsung tanpa adaptasi kontekstual.

Konteks pemerintah daerah Indonesia memiliki sejumlah karakteristik yang memerlukan perhatian khusus dalam adaptasi kerangka Agile Governance. Pertama, tingginya politisasi birokrasi yang menjadikan inovasi kebijakan rentan terhadap perubahan kepemimpinan. Di Banyuwangi, banyak inovasi digital yang sangat terkait dengan kepemimpinan Bupati tertentu, menimbulkan pertanyaan tentang keberlangsungannya dalam jangka panjang. Agile Governance yang berkelanjutan membutuhkan pelembagaan inovasi yang melampaui figur pemimpin individual.

Kedua, heterogenitas kapasitas aparatur yang masih sangat tinggi. Meskipun Banyuwangi termasuk daerah dengan kapasitas di atas rata-rata, disparitas kompetensi digital antar unit masih signifikan. Strategi Agile yang berhasil di Silicon Valley tidak dapat langsung ditransplantasikan ke dalam birokrasi yang kapasitas dasarnya masih belum merata. Ketiga, keterbatasan fiskal pemerintah daerah yang menjadikan investasi infrastruktur digital rentan terhadap fluktuasi pendapatan daerah. Model Agile Governance untuk

konteks Indonesia perlu memperhitungkan skenario pembiayaan yang tidak bergantung sepenuhnya pada kemampuan fiskal daerah, termasuk mekanisme pembiayaan berbasis kemitraan publik-privat yang terstruktur.

PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN

Artikel ini telah menganalisis Agile Governance sebagai kerangka konseptual untuk reformasi birokrasi digital dengan mengambil konteks Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Beberapa kesimpulan utama dapat dirumuskan. Pertama, Agile Governance menawarkan kerangka yang lebih relevan dan responsif untuk reformasi birokrasi di era digital dibandingkan paradigma konvensional, dengan menekankan iterasi cepat, kolaborasi multi-aktor, orientasi pengguna, ekosistem data, dan ketahanan adaptif.

Kedua, Banyuwangi telah menginisiasi berbagai inovasi digital yang secara parsial mencerminkan prinsip-prinsip Agile Governance, terutama pada dimensi infrastruktur teknologi dan inisiatif kolaborasi. Namun terdapat gap implementasi yang signifikan pada aspek interoperabilitas data, kompetensi digital aparatur yang merata, dan mekanisme partisipasi publik yang deliberatif. Ketiga, Model Agile Governance Berlapis (MLAGM) yang diusulkan dalam artikel ini menawarkan kerangka integratif yang mempertimbangkan dimensi teknis, organisasional, dan sosio-kultural secara simultan, serta mengakui kompleksitas konteks birokrasi daerah di Indonesia.

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini merumuskan empat saran kebijakan. Pertama, pemerintah daerah perlu mengembangkan Roadmap Agile Governance yang memuat target iterasi kebijakan yang terukur dan mekanisme umpan balik yang terlembagakan. Kedua, investasi dalam pengembangan kompetensi digital aparatur perlu ditingkatkan secara signifikan, dengan target pencapaian kompetensi digital menengah bagi seluruh aparatur. Ketiga, platform data terpadu yang mengintegrasikan seluruh sistem informasi daerah menjadi prioritas infrastruktur yang tidak dapat ditunda. Keempat, mekanisme partisipasi publik digital perlu ditingkatkan dari level konsultatif menuju level deliberatif melalui desain platform yang purposif dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bannister, F., & Connolly, R. (2014). ICT, public values and transformative government: A framework and programme for research. *Government Information Quarterly*, 31(1), 119-128.
- Beck, K., et al. (2001). *Manifesto for Agile Software Development*. Agile Alliance. <https://agilemanifesto.org/>
- Dwiyanto, A. (2021). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Jabbour, C. J. C., et al. (2020). Digital transformation and value co-creation in public sector: A systematic literature review. *International Journal of Public Administration in the Digital Age*, 7(3), 1-22.
- Janowski, T. (2015). Digital government evolution: From transformation to contextualization. *Government Information Quarterly*, 32(3), 221-236.
- Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2017). Benefits, adoption barriers and myths of open data and open government. *Information Systems Management*, 29(4), 258-268.
- Kurniawan, D. I., Maulana, A., & Wicaksono, I. (2021). Agile governance sebagai bentuk transformasi inovasi pemerintah daerah. Dr. Diss. Univ. Muhammadiyah Jember.
- Kurniawan, R. C. (2021). *Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah*. Forda Publishing.
- Linders, D. (2012). From e-government to we-government: Defining a typology for citizen coproduction in the age of social media. *Government Information Quarterly*, 29(4), 446-454.

- Mergel, I., Gong, Y., & Bertot, J. (2018). Agile government: Systematic literature review and future research. *Government Information Quarterly*, 35(2), 291-298.
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. Routledge.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banyuwangi 2021-2026*. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public Management Reform: A Comparative Analysis* (4th ed.). Oxford University Press.
- Siddiquee, N. A. (2016). E-government and transformation of service delivery in developing countries. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 10(3), 368-390.
- Sukoco, S. A., & Maulana, A. (2022). Digitalisasi pemasaran melalui platform media sosial. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 3(2.1 Desember), 1179-1184.
- United Nations. (2022). *UN E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.